

Refleksi 100 Tahun Kebangkitan Nasional

July 17, 2008 – 6:55 am

Sejak didirikannya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, tak terasa sudah 100 tahun usia kebangkitan nasional kita. Namun esensi dari kebangkitan nasional itu sendiri nampaknya tidak cukup kuat menembus zaman, seperti Budi Utomo yang juga tidak cukup kuat untuk terus berkiprah melewati masa-masa perjuangan. Dari tahun ke tahun Indonesia tidak juga bangkit. Hal ini terjadi karena ada yang salah dengan konsep kebangkitan nasional yang kita anut. Kesalahan konsep kebangkitan nasional itu tercermin dari pilihan momentumnya yang kurang tepat.

Meluruskan Sejarah Kebangkitan Nasional

Selama ini momentum kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai hari kebangkitan nasional, 20 Mei 1908 dipandang sebagai babak baru perjuangan bangsa Indonesia menuju kebangkitan nasional. Padahal Budi Utomo sendiri merupakan organisasi elit yang hanya mengakomodasi segelintir masyarakat dari suku dan golongan sosial tertentu, yaitu ningrat Jawa. Sangat spesifik. Bahkan menurut Ahmad Mansyur Suryanegara, sejarawan, Budi Utomo menolak persatuan Indonesia dalam kongresnya pada bulan April 1928. Penolakan itu dilanjutkan dengan penolakan Budi Utomo atas bahasa Indonesia, tercatat mereka lebih menyukai bahasa Belanda dan Jawa sebagai bahasa nasional. Singkatnya Budi Utomo menolak isi Sumpah Pemuda yang notabene adalah batu pijakan penting perjuangan bangsa Indonesia. Lalu kebangkitan nasional macam apa yang kita lihat dari pendirian Budi Utomo?

Melihat fakta yang demikian maka sudah seharusnya kita mencoba untuk mengevaluasi kembali pilihan momentum kebangkitan nasional kita. Momentum kebangkitan nasional seharusnya dinisbatkan kepada momen yang lebih mengakomodasi kebangkitan seluruh rakyat Indonesia, bukan sekedar kebangkitan segelintir elit saja. Dalam dunia modern ini, setiap kebangkitan pastilah dipengaruhi oleh unsur manusianya. Dengan kata lain pembangunan sumber daya manusia menjadi penting disini. Semakin unggul manusianya, maka akan semakin unggul pula negara tersebut. Setidaknya ada dua hal mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan akan memengaruhi kualitas manusia dari sisi kekuatan pikiran dan pembentukan karakter, sedangkan kesehatan memengaruhinya dari sisi kekuatan fisik. Kesemuanya itu akhirnya akan bersinergi dalam menghasilkan produktifitas yang amat diperlukan dalam kebangkitan nasional sebuah bangsa.

Sementara itu, pada 18 November 1912 KH Ahmad Dahlan memfasilitasi pendidikan pertama yang terbuka bagi rakyat Indonesia dengan mendirikan Muhammadiyah. Itu artinya 10 tahun di depan Taman Siswa yang didirikan pada 1922 oleh Ki Hajar Dewantara yang dicatat sebagai momentum kebangkitan pendidikan nasional. Muhammadiyah pada akhirnya diakui jauh lebih berperan dalam masyarakat ketimbang Taman Siswa maupun Budi Utomo. Dalam perkembangannya Muhammadiyah terlibat aktif dalam beberapa bidang pelayanan masyarakat, diantaranya pendidikan dan kesehatan. Sampai saat ini Muhammadiyah tercatat memiliki ribuan sekolah dari jenjang taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dan rumah sakit yang tersebar di hampir seluruh pelosok nusantara. Ditambah dengan organisasi-organisasi di bawahnya yang bergerak dalam bidang kepemudaan, kewanitaan dan lain sebagainya, tak diragukan lagi, Muhammadiyah merupakan aset besar yang selayaknya mendapatkan tempat dalam sejarah kebangkitan nasional bangsa Indonesia.

Sekedar Sensasi, Bukan Esensi

Dalam peringatan 100 tahun kebangkitan nasional ini kita disuguhkan dengan sebuah irasionalitas. Di saat sebagian besar penduduk negeri ini terpuruk dan terancam lebih terpuruk lagi menjelang kenaikan harga BBM, sebagian penduduk yang lain justru mengekspresikan kebangkitan nasional dengan berbagai seremonial dan simbolisme hedon. Ada festival obor yang dilangsungkan di Jakarta dengan meriah. Ada konvoi 250 Moge, di tengah krisis energi nasional, yang 'minum' banyak bensin bersubsidi dengan tajuk Jalur Merah Putih yang menjadi populer karena kecelakaan yang menimpa Sophan Sophiaan. Ada pembangunan tugu kebangkitan nasional oleh Menpora yang, entah apa maksudnya, menggunakan unsur tanah dan air dari 33 propinsi di Indonesia.

Dan dalam skala nasional ada malam perayaan super mewah yang melibatkan ribuan orang dengan sistem pencahayaan dan suara ribuan watt yang diadakan di Stadion GBK yang dihadiri Presiden beserta para pejabat tinggi Negara. Kita melihat gambaran sempurna dari masyarakat Indonesia pada berbagai festival itu. Kita melihat anak-anak Indoensia yang sehat, pintar dan berprestasi. Mereka semua tentunya berpakaian dengan layak dan bergizi baik pula. Kita melihat sebuah 'festival untuk kaisar' ala feodalisme diadakan di stadion GBK. Kita juga melihat kelompok 'masyarakat impian' yang mampu menghamburkan devisa untuk membeli Moge impor seharga ratusan juta rupiah dalam konvoi Moge Jalur Merah Putih.

Sementara di saat yang sama kita menyaksikan fragmen riil yang berbeda. Kita melihat demonstrasi menentang rencana kenaikan harga BBM marak di berbagai daerah, di saat yang sama juga kita melihat kartu BLT mulai dibagikan oleh pemerintah yang diwarnai dengan kericuhan antara warga dengan aparat desa yang membagikan, dan di saat yang sama juga kita lihat mulai terungkapnya penimbunan BBM di berbagai tempat untuk meraih untung saat harga BBM naik. Kita juga menyaksikan ribuan nelayan tidak bisa melaut karena tidak mampu membeli bahan bakar. Mereka menganggur. Belum lama ini juga kita menyaksikan ibu dan anak kita mati karena kelaparan. Lalu dimana letak kebangkitan itu?

Harus kita akui bahwa kita adalah bangsa yang lebih menyukai sensasi ketimbang esensi. Bayangkan, isu krusial tentang rencana kenaikan harga BBM nyaris hilang hanya karena dialihkan isu SMS santet. Persis seperti kemunculan kolor ijo beberapa tahun yang lalu. Inilah kondisi masyarakat kita di peringatan 100 tahun kebangkitan nasional ini, mereka miskin, bodoh dan konsumtif. Ini masalah kita. Dan jika kita ingin bangkit maka masalah inilah yang harus kita selesaikan, bukannya malah mengerdilkan makna kebangkitan nasional dengan berbagai festival dan seremonial di tengah keterpurukan yang terjadi.

Rachmad Satriotomo

Mahasiswa Fakultas Ekonomi UI